

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian adalah sektor pembangunan yang mempunyai peran strategis. Sektor pertanian keberadaannya menjadi penting bagi ketersediaan pangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk mempertahankan kehidupan karena kecukupan pangan bagi setiap orang dalam setiap waktu merupakan suatu hak yang harus dipenuhi. Masalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat di suatu wilayah menjadi sasaran utama pemerintah. Indonesia sebagai negara agraris yang memiliki jumlah penduduk yang besar tentunya memiliki tantangan yang kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, sehingga masalah ketahanan pangan menjadi isu dalam pembangunan pertanian. (Ramlayana et al., 2020)

Salah satu peran pemerintah dalam pembangunan pertanian adalah memberikan subsidi untuk sektor pertanian, subsidi merupakan suatu bentuk bantuan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dengan membayar dari sebagian harga yang harus dibayarkan petani ataupun kelompok tani tertentu untuk memberi suatu barang atau jasa menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Salah satu bentuk subsidi yang diberikan pemerintah di sektor pertanian adalah subsidi pupuk. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani ataupun kelompok tani. Pupuk bersubsidi merupakan bantuan yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu petani mengurangi biaya input untuk meningkatkan mutu hasil pertanian di Indonesia (Rigi et al., 2019)

Pemerintah dalam mendukung pencapaian sasaran produksi pertanian yang terus meningkat pemerintah memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana pertanian antara lain pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Kebijakan subsidi pupuk ialah salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan agar petani dapat mengakses kebutuhan pupuk untuk usahatannya yang lebih terjangkau sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian guna mencapai ketahanan pangan nasional serta meningkatkan pendapatan petani (Kholis dan Setiaji, 2020)

Efektivitas penggunaan pupuk bersubsidi ditujukan kepada penggunaan pupuk yang berimbang baik pupuk organik maupun non organik sesuai rekomendasi spesifik lokasi dan standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan, hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/Ktps/RC.210/B/02/2019 tentang pedoman teknis pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2019 (Ramlayana et al., 2020)

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi maka kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan petani yang sebenarnya, pekebun, peternak dan petambak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk RDKK yang juga merupakan akses pemerintah dalam memenuhi kebutuhan petani yaitu sarana produksi, bibit tanaman unggul dan alat mesin pertanian (Mamahit et al., 2021)

Kelompok tani memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran kepada petani yang membutuhkan. Salah satu syarat utama untuk memperoleh pupuk bersubsidi adalah penyusunan RDKK oleh kelompok tani. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 mengenai alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, yang menyatakan bahwa subsidi hanya diberikan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban petani dalam penyediaan pupuk, serta mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Di samping itu, penyuluh pertanian juga memiliki peranan penting dalam mendampingi kelompok tani, khususnya dalam proses penyusunan RDKK dan pemenuhan kebutuhan usaha tani. Penyuluh merupakan sumber informasi yang kompeten dan bertugas memberikan pendidikan, bimbingan, serta penyuluhan kepada petani. Efektivitas peran penyuluh ini dapat dilihat dari kinerjanya dalam membantu kelompok tani menjalankan fungsinya secara optimal. (Painneon et al, 2022)

B. Rumusan Masalah

Sektor pertanian berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan juga perekonomian Negara baik di tingkat nasional maupun daerah, pertanian mempunyai kontribusi besar dalam memberikan kesempatan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Pemenuhan kebutuhan pangan sebagai kebutuhan dasar melalui produktivitas padi. Padi merupakan salah satu komoditas yang menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Padi memerlukan input produksi berupa benih, pupuk, obat-obatan dan lain-lain. Pupuk berkontribusi dalam meningkatkan hasil dan kualitas produk. Peningkatan produktivitas melalui terjaminnya kebutuhan pupuk yang dibutuhkan petani padi sehingga pendapatan petani meningkat dan tercapainya swasembada pangan. Sebagai salah satu faktor input dalam melakukan usahatani padi yang memenuhi kebutuhan unsur hara di dalam tanah serta meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit dan pengaruh iklim pupuk menjadi kebutuhan yang paling penting bagi tanaman. Dalam rangka meringankan biaya pupuk sebagai salah satu faktor input produksi usahatani padi pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi pupuk agar produktivitas padi meningkat dan juga meningkatkan mutu dari hasil produksi padi dengan terjaminnya kebutuhan pupuk yang diperlukan tanaman (Kholis dan Setiaji, 2020).

Setiap provinsi yang ada di Indonesia memperoleh alokasi pupuk bersubsidi salah satunya Sumatra Barat memperoleh pupuk bersubsidi untuk meringankan biaya yang dikeluarkan petani dalam penyediaan dan pemakaian pupuk dalam kegiatan usahatani padi (Dinas Pertanian Sumatra Barat, 2020)

Perencanaan subsidi pupuk dimulai dari adanya RDKK. Perencanaan subsidi pupuk yang tepat dalam RDKK seharusnya disusun oleh petani dan dilakukan pengawasan oleh penyuluh. peran penyuluh tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai membahas, menyusun, dan menyepakati daftar RDKK. untuk itu dibutuhkan kelembagaan yang efektif dalam pendistribusian pupuk dan perencanaan dalam pendistribusian pupuk (Darwis dan Supriyati, 2013)

Penyuluh pertanian merupakan ujung tombak pelaksana kebijakan pemerintah di sektor pertanian. Penyuluh tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga membimbing petani dalam memahami dan menjalankan sistem distribusi pupuk bersubsidi. Peran penyuluh sebagai fasilitator, motivator, komunikator, dan innovator menjadikannya aktor kunci dalam mendorong perubahan perilaku petani ke arah yang lebih adaptif dan produktif. Dalam proses penyusunan dan verifikasi RDKK, penyuluh pendamping berfungsi sebagai jembatan antara petani, kelompok tani, pengecer, dan pemerintah (Rahmawati et al, 2019).

Proses penyaluran pupuk bersubsidi membutuhkan RDKK sebagai pedoman, adanya perbedaan harga antara pupuk bersubsidi dengan non bersubsidi. Harga pupuk bersubsidi terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan, penjualan pupuk seharusnya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020, Namun pada kenyataannya ditemukan indikasi penjualan pupuk dengan harga diatas HET (Ayu et al, 2022)

Efektivitas pemberian subsidi sendiri juga mulai dipertanyakan oleh sebagian kalangan karena selama ini subsidi yang diberikan dinilai masih kurang tepat sasaran. Selain itu, mekanisme pemberian subsidi melalui produsen (tidak langsung) telah dikritisi oleh banyak kalangan karena dianggap hanya menguntungkan pihak produsen, bukan kepada petani sebagai kelompok sasarannya. Permasalahan lain dalam subsidi pupuk yang juga mendapat banyak sorotan adalah masalah lemahnya pengawasan distribusi pupuk sehingga hampir setiap tahun terjadi kelangkaan pupuk dalam musim tanam (Mamahit et al., 2021)

Di Nagari Lubuk Pandan terdapat 14 Kelompok Tani dan semua Kelompok Tani di Nagari ini mendapatkan penyaluran pupuk subsidi, penyaluran ini di dukung oleh kios yang ada pada Kecamatan 2XII Enam Lingkung, dimana terdapat lima kios dan kelima kios tersebut merupakan penyalur pupuk subsidi, kios yang terdapat di Kecamatan 2XII Enam Lingkung ini ialah Kios Dahaga Tani, Kios Oel, Kios Harves Holtikultura, Kios Sejahtera Tani, dan Kios Saung Tani.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di lapangan kepada salah satu anggota kelompok saat survei bahwa kebutuhan pupuk subsidi yang diterima kadang tidak sesuai dengan kebutuhan petani, hal itu disebabkan karena pemerintah mengurangi anggaran subsidi pupuk di tahun. Hal ini menyebabkan petani harus menambah sendiri kebutuhan pupuk yang masih kurang. Dan harga pupuk subsidi yang dijual pengecer tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Dan permasalahan lain dalam pendistribusian pupuk subsidi di Nagari Lubuk Pandan adalah tidak semua anggota kelompok tani ikut serta dalam penyusunan RDKK pupuk subsidi. Peran penyuluh pertanian dalam mendampingi kelompok tani juga belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya anggota kelompok tani yang kurang berpartisipasi pada saat pertemuan menyusun RDKK

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dilakukan

1. Bagaimana pelaksanaan program pupuk bersubsidi di Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman
2. Bagaimana peran penyuluh dan peran kelompok tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman
3. Bagaimana efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi pada Kelompok Tani di Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan program pupuk bersubsidi di Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman
2. Mendeskripsikan peran penyuluh dan kelompok tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi pada Kelompok Tani di Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman
3. Mengetahui efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi pada Kelompok Tani di Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi serta sebagai sarana penerapan ilmu yang diperoleh selama kuliah
2. Bagi instansi dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani
3. Bagi akademis dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi dalam bidang penelitian serupa.

